

BAB II

LANDASAN LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan (*agency theory*) sebagai hubungan kerja sama antara pihak pemilik perusahaan (*principal*) dan pihak pengelola perusahaan (*agent*). Pemegang saham menyerahkan tanggung jawab pengelolaan kegiatan perusahaan kepada manajemen serta mengambil keputusan atas nama perusahaan. Hubungan tersebut muncul karena pemilik perusahaan memiliki keterbatasan dalam mengelola perusahaan secara langsung sehingga diperlukan pihak lain yang dipercaya untuk menjalankan aktivitas perusahaan sehari-hari (Hendrastuti & Harahap, 2023). Ramadhan et al. (2022), menjelaskan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika pemegang saham menyerahkan kewenangan kepada manajemen untuk mengelola sumber daya perusahaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham.

Kepentingan manajemen tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham sehingga dapat menimbulkan konflik keagenan. Wang (2024), mengungkapkan *agency theory* digunakan untuk memaparkan bagaimana hubungan antara pemilik modal dan manajemen dapat memengaruhi pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Pihak manajemen memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan pemilik perusahaan sehingga manajemen memiliki

peluang untuk mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Kondisi tersebut dapat menyebabkan munculnya perilaku oportunistik yang berpotensi merugikan pemegang saham apabila tidak disertai pengawasan yang memadai.

Teori keagenan juga menjelaskan bahwa setiap pihak dalam perusahaan cenderung berupaya memaksimalkan kepentingannya masing-masing. Pemegang saham mengharapkan peningkatan keuntungan dan nilai perusahaan, sedangkan manajemen sering kali lebih berorientasi pada kepentingan pribadi, seperti memperoleh bonus, insentif, maupun mempertahankan jabatan (Hardman, 2024). Al-Faryan (2024), menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan tersebut diperparah oleh adanya *information asymmetry*, yaitu kondisi ketika manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan investor sebagai pemilik modal. Akibatnya, pemegang saham mengalami keterbatasan dalam mengawasi seluruh tindakan manajemen.

Ketidakseimbangan informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan pengelolaan laba atau merekayasa laporan keuangan demi kepentingan tertentu (Susanti et al., 2022). Kondisi tersebut menyebabkan pengguna laporan keuangan kesulitan menilai kondisi perusahaan secara objektif sehingga keputusan ekonomi yang diambil investor maupun kreditor berpotensi mengalami kesalahan (Ramadhan et al., 2022). Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat asimetri informasi, semakin besar pula risiko terjadinya manipulasi laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan yang efektif dalam perusahaan

Agency theory memiliki hubungan erat dengan indikasi kecurangan laporan keuangan karena menjelaskan adanya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajemen. Manajemen yang memiliki akses informasi lebih besar berpotensi melakukan manipulasi laporan keuangan untuk mempertahankan citra perusahaan, memperoleh bonus, maupun memenuhi target keuangan (Yulianti et al., 2023). Chenkiani dan Prasetyo (2023), menyatakan bahwa praktik *fraud* lebih mudah terjadi ketika pengawasan perusahaan lemah. Oleh karena itu, penerapan *good corporate governance* serta pengelolaan *leverage* yang baik diharapkan mampu memperkuat pengawasan dan meminimalkan peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan (Susanti et al., 2022).

2.1.2 Kecurangan Laporan Keuangan

Kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan manipulasi yang dilakukan secara sengaja dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan tujuan menyajikan kondisi perusahaan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Manipulasi tersebut dilakukan agar perusahaan tampak memiliki kondisi keuangan yang baik sehingga mampu menarik investor, mempertahankan kepercayaan kreditor, maupun memenuhi target yang telah ditetapkan oleh manajemen. Praktik tersebut menyebabkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara objektif. Akibatnya, pengguna laporan keuangan berpotensi mengambil keputusan yang keliru karena informasi yang digunakan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya (Tamaela et al., 2025).

Tanjaya dan Kwarto (2022), menjelaskan bahwa kecurangan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk *fraud* yang dilakukan melalui rekayasa angka-angka akuntansi, penghilangan informasi penting, maupun penyajian informasi yang menyesatkan dalam laporan keuangan perusahaan. Tindakan tersebut bertujuan memberikan gambaran kondisi keuangan yang lebih baik dibandingkan keadaan sebenarnya. Informasi yang telah dimanipulasi berpotensi memengaruhi keputusan investor, kreditor, maupun pihak lain yang berkepentingan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, keandalan laporan keuangan menjadi berkurang sehingga fungsinya sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat dipenuhi secara optimal.

Kecurangan laporan keuangan juga diartikan sebagai tindakan penyimpangan yang dilakukan secara sengaja melalui manipulasi pencatatan transaksi, pengakuan pendapatan yang tidak sesuai, penggelembungan aset, maupun penyembunyian kewajiban perusahaan. Praktik tersebut tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi juga berdampak terhadap investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat luas sebagai pengguna laporan keuangan. Informasi keuangan yang telah dimanipulasi menyebabkan laporan keuangan kehilangan karakteristik relevan dan andal sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Dengan demikian, kecurangan laporan keuangan dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (Irman et al., 2023).

Kecurangan laporan keuangan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen. Salah satu bentuk yang paling umum adalah manipulasi pendapatan (*revenue manipulation*), yaitu praktik

mencatat pendapatan lebih besar dibandingkan jumlah sebenarnya agar laba perusahaan terlihat meningkat. Manipulasi tersebut umumnya dilakukan melalui pencatatan penjualan fiktif maupun percepatan pengakuan pendapatan sebelum transaksi benar-benar terjadi. Akibatnya, laporan keuangan menampilkan kinerja perusahaan yang lebih baik daripada kondisi ekonomi yang sesungguhnya (Putra & Lestanti, 2023).

Jenis kecurangan lainnya adalah penggelembungan aset perusahaan. Manajemen dapat meningkatkan nilai persediaan, piutang, maupun aset tetap secara tidak wajar agar kondisi keuangan perusahaan terlihat lebih baik dan stabil. Perusahaan juga dapat menyembunyikan sebagian kewajibannya sehingga tingkat utang tampak lebih rendah daripada kondisi sebenarnya. Praktik tersebut bertujuan meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya (Enggelita et al., 2025).

Natasia et al. (2021), mengemukakan bahwa kecurangan laporan keuangan juga dapat dilakukan melalui manipulasi beban perusahaan, seperti menunda pengakuan beban atau mengurangi pencatatan biaya tertentu agar laba tampak lebih tinggi. Praktik tersebut menyebabkan laporan laba rugi tidak mencerminkan kondisi operasional perusahaan yang sebenarnya. Selain itu, manipulasi dapat dilakukan melalui penyalahgunaan estimasi dan kebijakan akuntansi yang memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan metode akuntansi tertentu. Metode depresiasi, penilaian persediaan, serta estimasi kerugian piutang merupakan beberapa area yang rentan dimanfaatkan untuk memengaruhi angka-angka dalam laporan keuangan.

Kecurangan laporan keuangan terjadi karena adanya berbagai faktor yang mendorong manajemen melakukan tindakan manipulasi. Teori yang kerap diterapkan untuk menjelaskan penyebab *fraud* merupakan *fraud triangle theory* yang terdiri atas tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Perkembangan teori tersebut melahirkan *fraud diamond theory* yang menambahkan unsur kemampuan (*capability*) sebagai faktor pendorong terjadinya kecurangan. Selanjutnya, *fraud hexagon theory* menguraikan bahwasanya perilaku kecurangan dipengaruhi enam unsur, yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan, arogansi, dan kolusi. Berbagai teori tersebut menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan dapat terjadi akibat kombinasi faktor individu maupun kondisi organisasi yang memberikan kesempatan bagi pelaku guna merekayasa laporan keuangan (Enggelita et al., 2025; Setyono et al., 2023).

Faktor tekanan keuangan menjadi pemicu utama munculnya kecurangan laporan keuangan. Ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja, tingginya tingkat utang, maupun kesulitan mencapai target laba, manajemen cenderung berupaya mempertahankan citra perusahaan di hadapan investor dan kreditor. Kondisi tersebut dapat memotivasi manajemen untuk melakukan manipulasi dalam penyajian laporan keuangan guna menutupi kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, tekanan keuangan sering dipandang sebagai salah satu pemicu utama terjadinya kecurangan laporan keuangan (Yulianti et al., 2023).

Lemahnya sistem pengendalian internal dan mekanisme pengawasan perusahaan juga meningkatkan peluang terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Murti et al. (2025), menyatakan bahwa pengendalian internal yang tidak berjalan secara efektif memberikan kesempatan lebih besar bagi manajemen untuk merekayasa laporan keuangan tanpa mudah terdeteksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas tata kelola perusahaan memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya *fraud*. Dengan demikian, perusahaan memerlukan sistem pengendalian internal dan mekanisme pengawasan yang efektif agar risiko kecurangan laporan keuangan dapat diminimalkan.

Kecurangan laporan keuangan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi perusahaan maupun pihak eksternal yang menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Manipulasi laporan keuangan dapat menurunkan kepercayaan investor, menyebabkan kerugian bagi kreditor dan lembaga keuangan, serta memengaruhi keputusan ekonomi yang didasarkan pada informasi yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Selain itu, perusahaan yang terbukti melakukan kecurangan berisiko dikenai sanksi administratif, denda, maupun tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Praktik tersebut juga dapat merusak reputasi perusahaan dan menurunkan kualitas informasi akuntansi sehingga laporan keuangan kehilangan fungsinya sebagai sumber informasi yang relevan dan andal (Iftinan & Sukarmanto, 2022; Irman et al., 2023).

Pengukuran indikasi kecurangan laporan keuangan pada penelitian ini menerapkan model *Beneish M-Score*. Model tersebut diperkenalkan Beneish guna mengungkap potensi *fraudulent financial reporting* melalui analisis rasio keuangan perusahaan. Model *Beneish M-Score* dimanfaatkan karena mampu menganalisa indikasi manipulasi laporan keuangan melalui pengukuran beberapa rasio keuangan

yang berkaitan dengan kondisi operasional dan akuntansi perusahaan. Model Beneish *M-Score* terdiri atas delapan indikator rasio keuangan, yaitu *Days Sales Receivable Index* (DSRI), *Gross Margin Index* (GMI), *Asset Quality Index* (AQI), *Sales Growth Index* (SGI), *Leverage Index* (LVGI), *Depreciation Index* (DEPI), *Sales General and Administrative Expenses Index* (SGAI), serta *Total Accruals to Total Assets* (TATA). Delapan rasio digunakan untuk mendeteksi kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan (Handoko et al., 2022).

Indikator DSRI digunakan untuk mengukur adanya ketidakseimbangan antara piutang dan penjualan perusahaan. GMI berperan untuk menilai tingkat keuntungan perusahaan. AQI digunakan untuk menilai kualitas aset perusahaan, sedangkan SGI digunakan untuk mengetahui pertumbuhan penjualan perusahaan. DEPI digunakan untuk mengukur tingkat depresiasi aset perusahaan. SGAI dipakai untuk menghitung perubahan beban penjualan, umum, dan administrasi terhadap penjualan perusahaan. LVGI digunakan untuk mengetahui perubahan tingkat leverage perusahaan, sedangkan TATA digunakan untuk mengukur besarnya akrual terhadap total aset perusahaan (Kurniasari et al., 2024).

Perhitungan model Beneish *M-Score* dilakukan dengan menggabungkan delapan rasio tersebut ke dalam persamaan Beneish. Hasil perhitungan lalu dimanfaatkan untuk menggolongkan perusahaan pada golongan *manipulator*, *nonmanipulator*, atau *grey company*. Penentuan adanya indikasi manipulasi laporan keuangan dalam penelitian ini mengacu pada nilai batas Beneish *M-Score* sebesar -2,22. Apabila nilai Beneish *M-Score* suatu perusahaan berada di atas batas tersebut, perusahaan dinilai memiliki kecenderungan mengubah data keuangan untuk

menampilkan kondisi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Di sisi lain, nilai Beneish *M-Score* yang berada kurang dari -2,22 memperlihatkan perusahaan tidak terdapat indikasi penyimpangan dalam penyajian laporan keuangan (Kurniasari et al., 2024).

2.1.3 *Good Corporate Governance* (GCG)

Good corporate governance merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi perusahaan agar seluruh aktivitas operasional berjalan selaras dengan tujuan organisasi serta kepentingan para pemangku kepentingan. Penerapan *good corporate governance* bertujuan membangun sistem pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Melalui penerapan tata kelola yang baik, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan serta memperkuat kepercayaan investor, kreditor, dan masyarakat. Dengan demikian, *good corporate governance* menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan perusahaan yang berkelanjutan (Jafar & Manfarisyah, 2023).

Iqbal et al. (2024) mengungkapkan bahwa *good corporate governance* merupakan salah satu mekanisme penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan. Perusahaan yang menerapkan tata kelola secara optimal umumnya memiliki sistem pengendalian yang lebih efektif sehingga risiko terjadinya penyimpangan maupun manipulasi laporan keuangan dapat diminimalkan. Selain itu, penerapan *good corporate governance* berfungsi menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajemen dalam menjalankan

aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, tata kelola yang baik mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara seluruh pihak yang berkepentingan.

Penerapan *good corporate governance* tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana perusahaan menjalankan kegiatan usaha secara etis dan bertanggung jawab. Perusahaan dituntut untuk mematuhi peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Penerapan tata kelola yang baik juga mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap proses bisnis perusahaan. Dengan demikian, *good corporate governance* menjadi faktor penting dalam menciptakan perusahaan yang sehat dan berkelanjutan (Yulianti et al., 2023).

Prinsip *good corporate governance* menjadi landasan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan agar perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasional secara efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Putri D. dan Trisnaningsing (2023), menjelaskan bahwa terdapat lima prinsip utama dalam *good corporate governance*, yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Kelima prinsip tersebut saling melengkapi dalam menciptakan sistem tata kelola perusahaan yang efektif dan berintegritas.

Prinsip *transparency* berkaitan dengan keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Perusahaan harus menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu agar investor maupun pengguna laporan keuangan memperoleh gambaran yang sebenarnya

mengenai kondisi perusahaan. Keterbukaan informasi juga memperkuat fungsi pengawasan sehingga peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan dapat diminimalkan. Oleh karena itu, transparansi menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (Yulianti et al., 2023).

Prinsip *accountability* menunjukkan bahwa setiap organ perusahaan harus memiliki kejelasan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dalam proses pengelolaan perusahaan. Kejelasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan pengawasan berjalan secara efektif serta setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan yang memiliki sistem akuntabilitas yang baik cenderung lebih mampu mengendalikan risiko penyimpangan maupun tindakan *fraud*. Dengan demikian, prinsip ini berperan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan kualitas tata kelola perusahaan (Iqbal et al., 2024).

Prinsip *responsibility* berkaitan dengan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta etika bisnis yang berlaku. Perusahaan berkewajiban menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Sementara itu, prinsip *independency* menekankan bahwa perusahaan harus dikelola secara profesional serta bebas dari dominasi maupun intervensi pihak tertentu yang dapat memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Penerapan kedua prinsip tersebut diharapkan mampu menciptakan proses pengelolaan perusahaan yang objektif, transparan, dan berintegritas (Alfredo et al., 2026).

Prinsip *fairness* menekankan bahwa perusahaan harus memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara adil sesuai dengan hak dan kewajibannya

masing-masing. Pemegang saham, karyawan, investor, kreditor, maupun pihak eksternal lainnya berhak memperoleh perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Penerapan prinsip ini berperan dalam membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, prinsip *fairness* menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang (Putri. D & Trisnaningsing, 2023).

Penerapan *good corporate governance* bertujuan menciptakan sistem tata kelola perusahaan yang sehat, transparan, dan akuntabel. Tata kelola yang baik mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta memperkuat kepercayaan investor dan kreditor terhadap perusahaan. Selain itu, penerapan *good corporate governance* juga membantu perusahaan menjaga reputasi serta mempertahankan keberlangsungan usahanya dalam jangka panjang. Dengan demikian, tata kelola yang baik memberikan manfaat bagi perusahaan maupun seluruh pemangku kepentingan (Yanti et al., 2026).

Mekanisme *good corporate governance* berfungsi sebagai alat pengendalian guna menjaga kebijakan manajemen supaya sejalan dengan tujuan perusahaan. Mekanisme tersebut berfungsi meminimalisir pertentangan kepentingan antara pihak pemilik perusahaan dan manajemen serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam perusahaan (Iqbal et al., 2024). Praktiknya pada GCG diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Berdasarkan mekanisme tersebut, penelitian ini berfokus pada komisaris independen dan komite

audit karena keduanya memiliki peran penting dalam memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, serta menjaga kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

2.1.3.1 Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance* yang berfungsi sebagai pihak pengawas dalam perusahaan. Dalam penerapan *corporate governance*, perusahaan tercatat diwajibkan memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari total anggota dewan komisaris. Keberadaan komisaris independen diperlukan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap manajemen agar pengambilan keputusan perusahaan tetap sejalan dengan kepentingan pemilik saham serta pihak yang berkepentingan lain. Dalam penelitian Himawan (2022), komisaris independen diprosikan dengan persentase komisaris independent dalam keseluruhan dewan komisaris perusahaan. Dengan demikian, peningkatan jumlah komisaris independent diyakini akan memperkuat efektivitas fungsi pengawasan terhadap manajemen dalam mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan.

2.1.3.2 Komite Audit

Komite audit adalah salah satu organ pendukung dalam mekanisme *corporate governance* yang berperan dalam memperkuat fungsi pengawasan dewan komisaris, terutama terkait dengan mekanisme pelaporan keuangan perusahaan. Dalam penelitian Himawan (2022), komite audit ditentukan oleh kuantitas anggota yang tergabung pada setiap perusahaan. Keberadaan komite audit dipandang penting karena memperkuat peran pengawasan dalam tahapan pembuatan laporan

keuangan. Peningkatan jumlah anggota komite audit diperkirakan memperkuat fungsi kontrol atas laporan keuangan, sehingga risiko kemungkinan terjadinya manipulasi laporan keuangan cenderung semakin rendah.

2.1.4 Leverage

Leverage adalah tingkat penggunaan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi dengan harapan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Penggunaan utang tersebut menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk membayar pokok pinjaman beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, *leverage* sering dikaitkan dengan tingkat risiko keuangan karena semakin besar proporsi utang yang digunakan, semakin besar pula kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Dengan demikian, *leverage* menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kondisi keuangan perusahaan (Cita, 2023).

Susanti et al. (2022) menjelaskan bahwa *leverage* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tingkat *leverage* juga mencerminkan struktur pendanaan perusahaan serta tingkat ketergantungan perusahaan terhadap sumber dana eksternal. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi umumnya menghadapi tekanan keuangan yang lebih besar dibandingkan perusahaan dengan tingkat *leverage* yang rendah. Oleh karena itu, informasi mengenai *leverage* menjadi salah satu aspek penting dalam analisis kinerja keuangan perusahaan.

Leverage menjadi salah satu indikator yang digunakan oleh investor dan kreditor dalam mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan. Tingkat *leverage* yang

tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh utang sehingga risiko keuangan perusahaan cenderung meningkat. Sebaliknya, tingkat *leverage* yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak mengandalkan modal sendiri dalam membiayai kegiatan operasionalnya. Dengan demikian, tingkat *leverage* dapat memberikan gambaran mengenai tingkat risiko dan stabilitas keuangan perusahaan (Pradipta et al., 2022).

Pengukuran *leverage* dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam membiayai aset maupun aktivitas operasionalnya. Rasio *leverage* juga digunakan untuk menilai tingkat risiko keuangan serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Susanti et al., 2022). Salah satu rasio yang paling sering digunakan adalah *Debt to Asset Ratio (DAR)*. Rasio ini menunjukkan besarnya proporsi utang yang digunakan untuk membiayai keseluruhan aset perusahaan.

Semakin tinggi nilai DAR, maka semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap utang dalam membiayai aset perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki risiko keuangan yang lebih tinggi (Suzan & Wulan, 2022). Selain DAR, pengukuran *leverage* juga dapat dilakukan menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)*. Rasio DER digunakan untuk membandingkan jumlah utang dengan modal yang dimiliki perusahaan. Tingginya nilai DER menunjukkan bahwasanya perusahaan lebih banyak menggunakan utang dibandingkan modal sendiri dalam struktur pendanaannya.

Dalam penelitian ini, *leverage* diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio (DAR)*, yaitu rasio yang mencerminkan proporsi total utang terhadap total aset

perusahaan. Penggunaan *DAR* dipilih karena mampu menggambarkan tingkat tekanan keuangan perusahaan serta risiko yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya. Semakin tinggi nilai *DAR*, semakin besar pula tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang sebagai sumber pendanaan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan tekanan bagi manajemen untuk mempertahankan kinerja perusahaan di hadapan investor maupun kreditor (Andayani et al., 2025).

Leverage memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan karena penggunaan utang dapat membantu perusahaan memperoleh tambahan modal untuk memperluas kegiatan operasional maupun investasi. Pengelolaan *leverage* yang efektif mampu meningkatkan efisiensi penggunaan modal serta mendukung peningkatan profitabilitas perusahaan. Namun, penggunaan utang yang berlebihan dapat meningkatkan beban bunga dan kewajiban pembayaran pinjaman sehingga berpotensi menimbulkan kesulitan keuangan. Apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, risiko terjadinya *financial distress* bahkan kebangkrutan akan semakin besar (Cita, 2023).

Suzan dan Wulan (2022), menjelaskan bahwa tingkat *leverage* yang tinggi juga dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang menghadapi tekanan keuangan akibat tingginya utang cenderung berupaya mempertahankan citra kinerjanya di hadapan investor maupun kreditor. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kecenderungan manajemen untuk melakukan manipulasi dalam pelaporan keuangan agar kondisi perusahaan terlihat lebih baik

dibandingkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, *leverage* sering dikaitkan dengan meningkatnya risiko terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Hubungan antara *leverage* dan indikasi kecurangan laporan keuangan dapat dijelaskan melalui teori keagenan (*agency theory*). Tingginya tingkat utang meningkatkan tekanan terhadap manajemen untuk menunjukkan kinerja keuangan yang baik agar tetap memperoleh kepercayaan dari investor dan kreditor. Tekanan tersebut dapat mendorong manajemen bertindak oportunistik dengan melakukan manipulasi laporan keuangan demi memenuhi persyaratan pinjaman maupun menjaga reputasi perusahaan (Andayani *et al.*, 2025). Kondisi tersebut sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen dapat memicu perilaku oportunistik ketika perusahaan menghadapi tekanan keuangan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, semakin besar pula risiko terjadinya indikasi kecurangan laporan keuangan (Susanti *et al.*, 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dijadikan landasan empiris menyusun kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Kajian pada penelitian sebelumnya memiliki tujuan mengetahui konsistensi hasil penelitian, perbedaan variabel yang dipakai, dan berkontribusi yang dihasilkan penelitian ini. Beberapa penelitian yang relevan pada topik pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Leverage* bagi indikasi kecurangan laporan keuangan ditampilkan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Nida Nabilah Nursya & Fajar Gustiawaty Dewi (2026)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara	X1: Dewan Komisaris Independen X2: Komite Audit X3: Kepemilikan Institusional Y: Kecurangan Laporan Keuangan	Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sementara dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan
Putri Dwi Wahyuni (2022)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Emiten BUMN	X1: <i>Good Corporate Governance</i> X2: <i>Leverage</i> X3: Kualitas Audit Y: Integritas Laporan Keuangan	Kepemilikan institusional dan kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sementara dewan komisaris independen, komite audit, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
Ribka Uly Natasya & Cris Kuntadi (2023)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Tekanan Eksternal, dan Stabilitas Keuangan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	X1: <i>Leverage</i> X2: Tekanan Eksternal X3: Stabilitas Keuangan Y: Kecurangan Laporan Keuangan	<i>Leverage</i> , tekanan eksternal, dan stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan
Marsellisa Nindito, Ilya Afianti, Poppy Sofia Koeswayo,	<i>Agency Effects: Related-Party Transactions, Corporate</i>	X1: <i>Related-Party Transactions</i> X2: <i>Institutional</i>	<i>Related-party transactions</i> berpengaruh positif signifikan terhadap

Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
dan Nanny Dewi Tanzil (2024)	<i>Governance, and Financial Statement Fraud in Indonesia</i>	<i>Ownership X3: Independent Commissioners Y: Financial Statement Fraud</i>	<i>financial statement fraud. Institutional ownership berpengaruh negatif signifikan terhadap financial statement fraud dan mampu memoderasi pengaruh related-party transactions terhadap financial statement fraud. Sedangkan independent commissioners tidak berpengaruh signifikan terhadap financial statement fraud.</i>
Vera Wahyu Isdiyanti, Endang Purwanti, Budi Riyanti (2024)	Pengaruh <i>Corporate Governance, Leverage, dan Kualitas Audit</i> terhadap Integritas Laporan Keuangan	X1: <i>Corporate Governance</i> X2: <i>Leverage</i> X3: Kualitas Audit Y: Integritas Laporan Keuangan	<i>Corporate governance dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan leverage berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Secara simultan seluruh variabel berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.</i>
Fadisa Talitha Sahda, Marsellisa Nindito, Hera Khairunnisa (2025)	Pengaruh Penerapan Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Indikasi Kecurangan	X1: Frekuensi Rapat Komite Audit (FRKA) X2: Proporsi Dewan Komisaris Independen	Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap indikasi

Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	(PDKI) X3: Kepemilikan Manajerial (KM) X4: Kepemilikan Institusional (KI) X5: Keberagaman Gender (KG) Y: Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan (KLIK)	kecurangan laporan keuangan. Proporsi dewan komisaris independen dan keberagaman gender berpengaruh positif namun tidak signifikan.
Angel Christin Hia, Friska Friska, Dwi Surtarti, Rani Simamora, Lisa Kustina (2025)	Implikasi Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> , Kualitas Audit, dan Leverage terhadap Integritas Laporan Keuangan	X1: <i>Good Corporate Governance</i> X2: Kualitas Audit X3: <i>Leverage</i> Y: Integritas Laporan Keuangan	<i>Good corporate governance</i> dan leverage tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
Putri Fifi Andayani, Andreas, Rheny Afriana Hanif (2025)	Pengaruh Stabilitas Keuangan, <i>Leverage</i> , Pengawasan yang Tidak Efektif, dan Pergantian Auditor terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan	X1: Stabilitas Keuangan X2: <i>Leverage</i> X3: Pengawasan yang Tidak Efektif Y: Kecurangan Laporan Keuangan	Pengawasan yang tidak efektif dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan, sedangkan stabilitas keuangan dan pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan.

Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Novita Angelina Tan, Anis Chariri (2022)	Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Aktivitas Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	X1: Proporsi Dewan Komisaris Independen X2: Aktivitas Komite Audit X3: Kepemilikan Manajerial Kontrol: Profitabilitas (ROE) Y: Kecurangan Laporan Keuangan	Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sementara itu, aktivitas komite audit, kepemilikan manajerial, serta variabel kontrol (profitabilitas dan leverage) tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan
Trisnadi Wijaya (2022)	Pengaruh Komisaris Independen, Kualitas Audit Dan <i>Financial Distress</i> Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2020	X1: Komisaris Independen X2: Kualitas Audit X3: <i>Financial Distress</i> Y: Integritas Laporan Keuangan	Komisaris independen dan <i>financial distress</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan
Rousilita Suhendah (2021)	Determinan Kecurangan Laporan Keuangan	X1: Stabilitas Keuangan X2: <i>Leverage</i> X3: Likuiditas Y: Kecurangan Laporan Keuangan	Stabilitas keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan <i>leverage</i> keuangan dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan

2.3 Kerangka Konseptual

Teori keagenan menguraikan kaitan kontraktual pada pemegang saham (*principal*) serta manajemen perusahaan (*agent*), yang mana pemegang saham mengalihkan hak serta wewenang dalam pengambilan keputusan kepada manajemen dalam mengelola perusahaan demi kepentingan *principal*. Dalam hubungan ini sering terjadi perbedaan tujuan *principal* dan *agent*, yang memunculkan permasalahan kepentingan dan *moral hazard*, khususnya ketika manajemen mempunyai akses informasi lebih lengkap daripada pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Permasalahan ini menciptakan *agency problem* yang memicu tindakan oportunistik oleh manajemen, termasuk manipulasi laporan keuangan untuk mempertahankan citra kinerja yang baik guna melindungi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan pemegang saham.

Penerapan *good corporate governance* menjadi mekanisme yang dipakai perusahaan guna mengurangi konflik keagenan dan meminimalkan tindakan oportunistik manajemen. Mekanisme seperti komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, serta kepemilikan manajerial berfungsi meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas manajemen. Pengawasan yang baik harapannya bisa menekan potensi kecurangan pada pelaporan keuangan karena pihak manajemen waspada menyusun laporan keuangan perusahaan (Iqbal et al., 2024).

Penelitian Sahda et al. (2025) mengindikasikan bahwasanya keberadaan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dan institusi terbukti berhubungan

secara negatif serta signifikan dengan potensi timbulnya kecurangan pada laporan keuangan perusahaan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwasanya semakin baik penerapan mekanisme *good corporate governance*, maka risiko terjadinya manipulasi laporan keuangan kian menurun. Penelitian Nindito et al. (2024) juga menegaskan bahwasanya *good corporate governance* berkontribusi signifikan dalam memastikan keandalan serta mutu laporan keuangan dan mengurangi kemungkinan terjadinya *financial statement fraud*.

Temuan empiris mengenai peran *good corporate governance* menekan kecurangan laporan keuangan masih belum memperlihatkan arah yang seragam. Hasil penelitian Hia et al. (2025) dan Isdiyanti et al. (2024) memperlihatkan *good corporate governance* tidak memiliki hubungan signifikan dengan integritas laporan keuangan. Ketidakkonsistenan temuan tersebut mengindikasikan efektivitas mekanisme *good corporate governance* mencegah kecurangan pelaporan keuangan kemungkinan dipicu kondisi atau karakteristik yang berbeda pada setiap penelitian. Oleh karena itu masih perlu dikaji kembali, terkhusus pada perusahaan manufaktur yang mempunyai aktivitas operasional kompleks dan tingkat risiko yang tinggi.

Selain *good corporate governance*, *leverage* juga menjadi faktor yang diduga memengaruhi indikasi kecurangan laporan keuangan. *Leverage* menunjukkan tingkat penggunaan utang perusahaan dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan. Tingginya *leverage* menyebabkan perusahaan menghadapi tekanan keuangan yang lebih besar karena perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran utang dan bunga pinjaman. Tekanan ini berpotensi memicu

pihak manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan supaya situasi perusahaan terlihat stabil di mata investor maupun kreditor (Susanti et al., 2022).

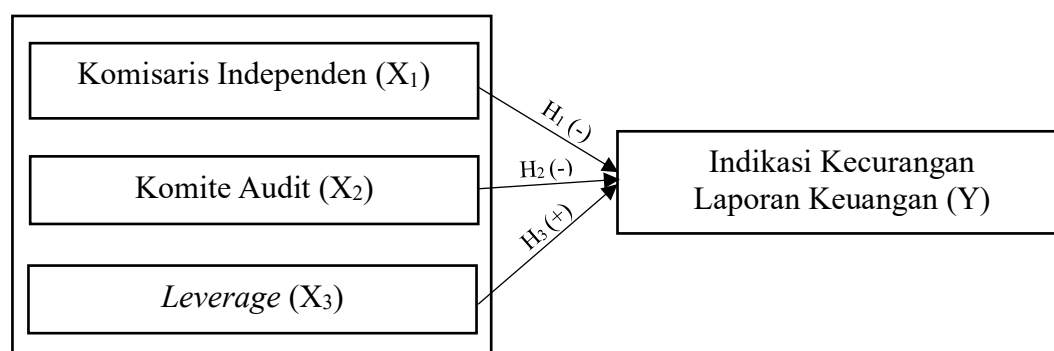
Penelitian Andayani et al. (2025), memperlihatkan bahwa *leverage* memberi pengaruh bagi indikasi kecurangan laporan keuangan. Kondisi ini selaras dengan penelitian Natasya dan Kuntadi (2023) yang mengemukakan *leverage* memberi pengaruh bagi kecurangan laporan keuangan karena tingginya tekanan eksternal dapat mendorong manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan. Tingkat *leverage* tinggi menyebabkan perusahaan berisiko keuangan tinggi membuat manajemen berupaya menjaga reputasi perusahaan dengan menyusun laporan keuangan yang baik.

Leverage sering dikaitkan dengan kualitas pelaporan keuangan, penelitian Wahyuni (2022) dan Hia et al. (2025) mengindikasikan bahwa variabel tersebut tidak memberi pengaruh signifikan bagi integritas laporan keuangan. Temuan tersebut mengisyaratkan tingkat penggunaan utang oleh perusahaan belum tentu dijadikan faktor yang secara langsung menentukan mutu serta tingkat kepercayaan informasi yang disampaikan melalui laporan keuangan. Adanya perbedaan temuan riset sebelumnya mengindikasikan bahwasanya hubungan antara *leverage* dan indikasi kecurangan laporan keuangan masih belum konsisten. Dengan demikian, penelitian kembali dilaksanakan dengan menggunakan objek, periode, serta kondisi perusahaan yang berbeda agar dapat mendapat hasil lebih relevan dan memperkuat temuan empiris sebelumnya.

Berdasarkan teori keagenan dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini menempatkan komisaris independen serta komite audit menjadi representasi dari

good corporate governance. Di sisi lain, *leverage* diposisikan sebagai faktor independen yang diduga berkaitan dengan munculnya indikasi kecurangan dalam laporan keuangan, yang menjadi variabel dependen dalam penelitian. Komisaris independen berkontribusi untuk memberikan monitoring yang objektif terhadap kebijakan dan keputusan manajemen, sehingga diharapkan bisa meminimalisir tindakan oportunistik manajemen yang berpotensi merugikan pemegang saham. Sementara itu, komite audit berfungsi sebagai perangkat pendukung dewan komisaris mengawasi proses penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan audit, serta efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan, sehingga kualitas laporan keuangan dapat terjaga (Himawan, 2022). Di sisi lain, tingginya *leverage* diduga bisa meningkatkan tekanan terhadap manajemen sehingga mendorong terjadinya manipulasi laporan keuangan (Cita, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

2.4 Hipotesis

Sugiyono (2023) menjelaskan bahwasanya hipotesis ialah dugaan sementara yang diajukan guna memecahkan rumusan masalah yang berlandaskan teori, kerangka pemikiran, dan hasil penelitian terdahulu. Perumusan hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada teori keagenan (*agency theory*) serta hasil penelitian terdahulu yang relevan mengenai pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit, dan *leverage* terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

2.4.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan

Salah satu unsur penting dalam dewan komisaris adalah komisaris independen yang berperan memonitor tindakan dan kebijakan manajemen secara tidak memihak. Persentase komisaris independen diperoleh melalui perbandingan jumlah anggota komisaris independen bagi keseluruhan anggota dewan komisaris. Guna menjaga kualitas tata kelola perusahaan, regulasi pasar modal menetapkan bahwa perusahaan yang tercatat pada bursa hendaknya mempunyai komisaris independen berjumlah paling sedikit 30% dari total dewan komisaris sehingga fungsi pengawasan dapat terlaksana secara lebih independen dan efektif. Tingginya proporsi komisaris independen sering kali belum mampu merefleksikan pengawasan yang optimal. Fungsi pengawasan tersebut memerlukan dukungan substansial berupa kompetensi teknis, penguasaan tata kelola, dan pemahaman yang memadai terhadap proses penyusunan laporan keuangan (Sahda et al., 2025).

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan terhadap manajemen berfungsi untuk meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Akan tetapi, efektivitas pengawasan tersebut tidak hanya ditinjau dari kuantitas atau jumlah komisaris independen, melainkan juga dari kualitas personal mereka, seperti kompetensi, pengalaman, kemampuan menganalisis laporan keuangan, serta kemandirian dalam pengambilan keputusan. Tanpa adanya kualitas tersebut, peningkatan proporsi komisaris independen menjadi tidak efektif dalam mencegah penyimpangan, bahkan berisiko melemahkan fungsi pengawasan dewan akibat keterbatasan kapabilitas yang dimiliki.

Tan dan Chariri (2022) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Sejalan dengan itu, (Wijaya, 2022) menyatakan bahwa komisaris independen berperan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan menjaga transparansi pelaporan keuangan. Semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka fungsi monitoring terhadap manajemen akan semakin optimal sehingga peluang terjadinya kecurangan laporan keuangan dapat ditekan. Mengacu perspektif teori keagenan serta hasil penelitian sebelumnya, hipotesis yang diajukan penelitian ini yaitu:

H1: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

2.4.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan

Komite audit termasuk bagian mekanisme pengendalian internal perusahaan yang berperan penting dalam mendukung dewan komisaris melaksanakan fungsi pengawasannya. Tugas komite audit meliputi pengawasan terhadap keandalan laporan keuangan, penilaian efektivitas pengendalian internal, serta pemantauan kepatuhan perusahaan pada berbagai peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsinya, komite audit dituntut untuk bersikap independen dan objektif, khususnya dalam melakukan evaluasi pada laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan maupun manipulasi informasi keuangan. Semakin memadai jumlah anggota komite audit, fungsi pengawasan pada proses pelaporan keuangan perusahaan juga semakin efektif (Nursya & Dewi, 2026).

Teori keagenan yang ditemukan oleh Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwasanya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen dapat mendorong manajemen melakukan tindakan oportunistik, termasuk kecurangan laporan keuangan. Untuk membatasi perilaku tersebut, komite audit berperan sebagai mekanisme pengawasan yang mendukung tugas dewan komisaris dalam menelaah proses pelaporan keuangan, mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, serta memastikan keselarasan perusahaan dengan ketentuan yang berlaku. Melalui fungsi pengawasan yang dijalankan secara efektif, kesempatan bagi manajemen melakukan rekayasa informasi akuntansi bisa ditekan sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan menjadi lebih rendah.

Temuan empiris Nursya dan Dewi (2026) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indella dan Husaini (2021). Hasil ini mengisyaratkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang semakin efektif oleh komite audit mampu membatasi peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaporan keuangan, sehingga tingkat kecurangan yang terjadi di perusahaan cenderung lebih rendah. Temuan tersebut stabil dengan perspektif teori keagenan, di mana komite audit menjadi mekanisme pengawasan yang mampu membatasi tindakan oportunistik manajemen melalui peningkatan kualitas pemantauan atas proses pelaporan keuangan. Berdasarkan pada teori keagenan dan argumentasi empiris tersebut, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H2: Komite audit berpengaruh negatif terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

2.4.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan

Leverage adalah tingkat penggunaan utang perusahaan dalam membiayai kegiatan operasional maupun investasi perusahaan. Tingginya *leverage* mengindikasikan bahwasanya perusahaan memiliki kewajiban pembayaran utang dan bunga yang besar sehingga perusahaan menghadapi tekanan keuangan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut dapat menguatkan manajemen mempertahankan citra perusahaan dengan tampilan laporan keuangan yang terlihat bagus di mata investor dan kreditor. Oleh sebab itu, *leverage* sering dikaitkan dengan risiko terjadinya praktik manipulasi laporan keuangan (Susanti et al., 2022).

Pengukuran *leverage* dalam penelitian ini menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR), yaitu rasio yang membandingkan total utang dengan total aset perusahaan. Rasio tersebut memperlihatkan seberapa jauh aset perusahaan didanai kewajiban yang dimiliki. Nilai DAR yang semakin tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki ketergantungan yang lebih besar terhadap sumber pendanaan berbasis utang serta menghadapi risiko keuangan yang lebih tinggi. Rasio ini banyak digunakan sebagai indikator *leverage* karena mampu memberikan gambaran mengenai struktur pendanaan perusahaan serta kapabilitas perusahaan dalam menunaikan kewajiban finansial yang harus dipenuhi dalam berbagai periode waktu (Andayani et al., 2025).

Teori keagenan menjelaskan bahwa manajemen sebagai entitas yang diberikan otoritas dalam pengelolaan perusahaan mempunyai kepentingan untuk mempertahankan reputasi dan keberlangsungan posisinya. Besarnya kewajiban utang yang harus ditanggung perusahaan dapat mendorong manajemen untuk menampilkan gambaran kinerja keuangan lebih menguntungkan dibandingkan keadaan sebenarnya. Kondisi ini semakin diperkuat oleh adanya kesenjangan informasi antara manajemen dan pemegang saham, yang memungkinkan manajemen memanfaatkan informasi yang dimilikinya untuk kepentingan tertentu, termasuk melakukan manipulasi dalam penyusunan laporan keuangan (Yulianti et al., 2023).

Indikasi kecurangan laporan keuangan diungkapkan oleh Andayani et al. (2025) memiliki keterkaitan erat dengan faktor *leverage* perusahaan. Struktur modal yang didominasi oleh utang luar secara otomatis memperbesar beban

tekanan keuangan (*financial pressure*) bagi organisasi. Tekanan finansial tersebut berisiko mendorong pihak manajemen untuk melakukan manipulasi pada laba bersih perusahaan, dengan tujuan menampilkan performa keuangan yang stabil di hadapan para investor. Di samping itu, besarnya volume transaksi utang yang kompleks berpotensi dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk memanipulasi standar akuntansi demi kepentingan sepihak. Hasil penelitian yang menunjukkan hubungan searah ini selaras dengan riset sebelumnya oleh Isdiyanti et al. (2024), Andayani et al. (2025), serta Natasya dan Kuntadi (2023). Berdasarkan pada teori keagenan dan argumentasi empiris tersebut, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.